

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA
PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA
(Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH:

Ferinda Tiaranisa
NPM: 1421030340

JURUSAN MUAMALAH

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA
PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA
(Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH:

Ferinda Tiaranisa
NPM: 1421030340

JURUSAN MUAMALAH

PembimbingI : Dr. H. Khairuddin, M.H.
PembimbingII : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan usaha Cuci Mobil Kusuma Utama ini pemilik melakukan kerja sama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cuci mobil dengan modal sepenuhnya dari pemilik cuci mobil yang diserahkan kepada pengelola dan hasil dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktek kerja sama antara pihak pemilik dan pengelola bahwa hasil yang didapat dikurangi modal dan sisa dari keuntungan, barulah dibagi pemilik 50% dan pengelola 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Pembagiannya dilakukan dengan akad perjanjian secara lisan apabila pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil Cuci Mobil Kusuma Utama tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kerja sama sistem bagi hasil Cuci Mobil Kusuma Utama di desa Bandung Baru ditinjau menurut konsep *mudharabah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cuci mobil dengan pengelola dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cuci mobil dengan pengelola di Desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Cuci Mobil Kusuma Utama di Desa Bandung Baru. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik cuci mobil dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa untuk memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Ferinda Tiaranisa**

NPM : **1421030340**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu)**

DISETUIJ

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP: 196210221993031002

Pembimbing II

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP: 197112041997032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag, M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA** (studi kasus pada cucian mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu). Disusun oleh **FERINDA TIARANISA**, NPM: 1421030340, Fakultas: Syariah, Jurusan: Muamalah Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Senin, 13 Agustus 2018**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹ (Q.S An-Nisa, 4:29)

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemeh/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:2007,hlm, 663

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Bahrul Kamal dan Ibu Nita Fatimah yang telah membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata, namun lantunan do'anya mampu kurasakan. Kulihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini.
2. Kakakku, Lidiya Olvisa S.Pd berserta suaminya Zulkifli S.Pdi dan yang selalu memberi motivasi, semangat, perhatian dan keceriaan sehingga studiku dapat terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Ferinda Tiaranisa, lahir di Kedondong, pada tanggal 26 Februari 1997, Anak Pertama dari pasangan Bapak Bahrul Kamal dan Ibu Nita Fatimah.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di MIN 1 Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tamat pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kedondong tamat pada tahun 2011, pendidikan selanjutnya dijalani di SMA Negeri 1 Kedondong tamat pada tahun 2014. Dan ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Ekonomi Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di UKM Pramuka angkatan 2014, aktif di organisasi ekstra PMII angkatan 2014 dan mengikuti kegiatan GenBI pada tahun 2016.

Bandarlampung, 02 Agustus 2018
Penulis,

Ferinda Tiaranisa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat dan karuniaNya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rosul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, Mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Nabi Muhammad lah yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.

3. Dr. H. Khairuddin M.H. dan Ibu Hj.Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala Desa, Bapak Endang dan Bapak Ardiani serta Karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama peneliti melakukan penelitian.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karna itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2018

Penulis,

Ferinda Tiaranisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Konsep Mudharabah.....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah	15
2. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	27
3. Prinsip-prinsip Mudharabah.....	37
4. Macam-macam Mudharabah.....	41
5. Hikmah Mudharabah.....	47
6. Berakhirnya Mudharabah.....	48

B. Sistem Bagi Hasil Usaha Cucian Mobil	51
1. Dasar Hukum	51
2. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola	52
3. Tanggung Jawab Terhadap Resiko Kerugian	55
4. Pembagian Hasil Usaha	57
 BAB III PROFIL CUCIAN MOBIL	59
A. Gambaran Umum Desa	59
1. Sejarah Cucian Mobil Kusuma Utama.....	59
2. Letak Geografis Cucian Mobil.....	61
3. Struktur Organisasi Cucian Mobil Kusuma Utama	64
 B. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pihak Cucian Mobil Kusuma Utama Dengan Pengelola Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kecamatan Pringsewu	65
 BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA	73
A. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	73
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pihak Cucian Mobil Kusuma Utama Dengan Pengelola Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kecamatan Pringsewu.....	75
 BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Pengantar Riset
- Lampiran 3 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tata Guna Tanah	61
Tabel 2 Jumlah RW dan RT	62
Tabel 3 Jumlah Penduduk Tiap Dusun.....	63
Tabel 4 Mata Pencaharian Desa Bandung Baru	63
Tabel 5 Struktur Organisasi Cucian Mobil Kusuma Utama	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu) yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.²
3. Bagi Hasil (*al-mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³

Berdasarkan istilah-istilah bagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam proposal ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada Tinjauan Islam tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). h.1060

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994). h. 154

³ Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.95

Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu)

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya usaha perkongsian yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yaitu kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, pemilik modal dan penerima modal.
2. Karena keinginan untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pemilik dan pengelola di Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Islam mengatur tentang pembagian hasil dalam kerjasama Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau

aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.⁴

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h.135

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرَانُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008). h.83

*(mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual'' (H.R Ibnu Majah).*⁶

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.⁷

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai

305 ⁶ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyrriyah. h.

⁷ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama), 2007, h. 231

modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.⁸

Praktik pada tempat penelitian yakni di Cucion Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu, melakukan akad kerja sama antara pemilik cucion mobil dengan pengelola cucion mobil. Dari data observasi yang peneliti dapatkan bahwasannya pendapatan di Cucion Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu tidaklah menentu akan tetapi peneliti memperoleh dari pemilik cucion mobil yakni sebagai berikut:

1. Kerjasama dilakukan dengan cara Pemilik cucion mobil memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucion mobil. Dengan modal sepenuhnya dari pemilik cucion mobil yang diserahkan kepada pengelolah cucion mobil. Dan hasil dibagi dua dari pemilik dan pengelola.
2. Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik dan pengelola cucion mobil yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pengelola 50% dan pemilik cucion mobil 50% dan apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola.
3. Pembagian hasil ini sangatlah menarik karena ditemukan satu orang yang melakukan pembagian hasil seperti ini. Di tempat Cucion Mobil Kusuma

⁸ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008). h. 302

Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu, Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila pemilik dan pengelola cucian mobil mendapat bagian yang sama dikarenakan kerugian ditanggung oleh pemilik, selama itu bukan kelalaian dari pengelola.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu: identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluhik kabupaten pringsewu) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluhik kabupaten pringsewu) ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka

1. Tujuan dari penelitian ini
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupeten pringsewu.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupeten pringsewu.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik fakultas syari'ah jurusan muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
 - b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola sesuai syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.⁹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan juga menggabungkan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literature dan mempelajarinya.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai

⁹ Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). h.2

pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari pemilik dan pengelola cucian mobil lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pemilik dan pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h . 44

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹¹ Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang telah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu pemilik dan pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.¹² Yang aman sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung di lokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerjasama bagi hasil dalam kerjasama Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu.

¹¹ *Ibid.*, h. 105

¹² AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). h. 85

Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan dimana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada pemilik dan pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.¹⁴ Data-data tersebut dapat berupa leak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007),h. 83

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁵ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002),h. 15

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Madharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.¹

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Muzamil ayat 20 yaitu²

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzamil:20)

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 244

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: AL Ma'arif, 1997) h. 36

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) h. 575

Selain *ad-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.⁴

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁵

Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).⁶

Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.⁷ Dengan demikian *mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.

Mudharabah adalah system kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudahrib*)

⁴ Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah) h.53

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) h. 11

⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 36

⁷ Rachmat Safe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 427

mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.⁸

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu⁹:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.¹⁰

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsipdagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah

⁸ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h.90

⁹ Helmi Karim, *Op.Cit.*,h. 12

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) h. 6

disetujui. Sedangkan secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹¹

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad *mudharabah*, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.¹²

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.¹³

Menurut Istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹¹ Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) h. 63

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 96

¹³ Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga) h. 35

- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى اشْرَكَةٍ فِي الرَّبْعِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ¹⁴

“akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ تَوْكِيلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِعَیْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَجَرَ بِخُصُوصٍ لِنَقْدَيْنِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ¹⁵

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.

- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنَّ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَجَرُّ فِيهِ بِجُزْءٍ
مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ¹⁶

¹⁴ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra) h. 35

¹⁵ *Ibid*, h. 38

¹⁶ *Ibid*, h. 42

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

- e. Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah

عُقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لَا لِيَتَجَرَ فِيهِ¹⁷

“Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.”

- f. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹⁸

- g. Menurut Imam Taqiyyudin, *Mudharabah* ialah

عُقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ يَأْتِجَارَةً¹⁹

“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

¹⁷ *Ibid*, h. 44

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 37

¹⁹ Taqiyyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, (Bandung: Alma’arif) h. 301

Mudharabah atau *qiradh* adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal.²⁰

Mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.²¹

Bentuk usaha *mudharabah* ini, ada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, *Mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (*mudharib*) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika *mudharib* ini megembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan *mudharib* sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.²²

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) h. 155

²¹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008) h. 168

²² Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakata:Gema Insani, 2006) h. 468

Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.²³

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam *mudharabah* ada unsur syirkah atau kerjasama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.²⁴ Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan *mudharabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut Qiradh oleh ulama Hijaz.²⁵

²³ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010) h. 223

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, 2010) h. 367

²⁵ Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiq Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h.16

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan.

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an


Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...


Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) h.106

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ^{٢٧} 

Artinya: ...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.


Al-Qur'an surat Al-muzammil ayat 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ^{٢٨} 

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Al-Qur'an surat AL-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ^{٢٩} 

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

²⁷ Ibid, h. 49

²⁸ Ibid, h. 575

²⁹ Ibid, h. 554

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ... ﴿٣٠﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ۚ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW.

Bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرَابُنُ الْقَسِمِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ

³⁰ Ibid, h. 31

³¹ Ibid, h. 83

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَاطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ³²

Artinya: “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).

c. Ijma’

Mudharabah disyari’atkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran.³³ Di antara ijma’ dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.³⁴ Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

³² Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyrriyah. h.

³³ Zainuddin Ali, M.A, *Op.Cit*, h. 155

³⁴ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 226

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁵ Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.³⁶

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁷

³⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) h. 191

³⁶ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 370

³⁷ M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 300

Rukun *mudharabah* menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.³⁸

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam,³⁹ yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekeja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan
- 6) Keuntungan.

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiz.

Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.38

³⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Op.Cit*, h. 199

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) Sighat (ijab dan qobul)

Menurut Jumhur Ulama,⁴⁰ rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Menurut Zuhayli,⁴¹ akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (Shahibul Mal)
- 2) Pengelola (Mudharib)
- 3) Ucapan serah terima (Sighat ijab wa qabul)
- 4) Modal (ra'sul mal)
- 5) Pekerjaan
- 6) Keuntungan.

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.177

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.92

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*⁴²:

- 1) Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- 2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- 3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalamangka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.⁴³

⁴² Amir Syarifudin, *Op.Cit*, h. 246

1) Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

2) Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

a) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecualibila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

b) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba' atau yang sejenisnya.

⁴³ Abdullah Al-Mushlih, *Shalah As-Shawi, Op. Cit*, h. 170-178

c) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- 2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu

oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.

- 3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

d) Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan denan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.

b. Syarat bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut⁴⁴:

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Op.Cit*, h. 199

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan,

maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka *mudharabahnya* fasid
- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah *mudharabah* dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- 3) Modal yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola.
- 4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- 7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- 8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- 9) Tidak menunda waktu.

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

1) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.⁴⁵

2) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaihi*) bahwa:⁴⁶

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan Qabul).

3) Berkenaan dengan laba, bahwa:⁴⁷

- a) Laba harus memiliki ukuran.

⁴⁵ Moh Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) h. 223

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*, h. 228

⁴⁷ *Ibid*

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.

- b) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.

3. Prinsip *Mudharabah*

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub system dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqih islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek

tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁴⁸

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan

⁴⁸ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004) h. 84

karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁴⁹

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁵⁰

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990) h. 10

⁵⁰ Helmi Karim, *Op.Cit*, h. 14

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.⁵¹

d. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵²

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit*, h.48

⁵² Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafe'I Antonio, *Op.Cit*, h. 22

hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk⁵³ yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk⁵⁴, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu

⁵³ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt) h.

⁵⁴ *Ibid*, h. 32

mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu)⁵⁵. Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut: *Mudharabah Mutlak (Al-muthlaq)*, dan *mudharabah terikat (Al-muqayyadah)*.

a. *Mudharabah mutlak (al-mutlak)*

Menurut Muhammad Asy-Syarbini *mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.*”⁵⁶

Mudharabah mutlak adalah penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.”⁵⁷

⁵⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005) h.59

⁵⁶ Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II, h. 310

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 372

Menurut Syafi'I Antonio *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.⁵⁸

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam⁵⁹, pada *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan darisiapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul al-mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Mudharabah muthlaqah, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka

⁵⁸ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 90

⁵⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) h. 1197

pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.⁶⁰

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁶¹

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam⁶², pada *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.

⁶⁰ M. Umer Capra, *Towards A Just Monetary System (terjemahan)*, (London: The Islamic Foudation, 1985) h. 248-249, tersedia dalam www.Google.book.com

⁶¹ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, h. 60

⁶² Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 1197

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila diaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, 'usahakan modal ini mulai bulan depan' sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.⁶³

5. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 372

Karenaya syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁶⁴

Jadi hikmah disyari'atkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur'an Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢٥﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat.

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya *mudharabah* yang dikehendaki syar'i yang maha bijaksana

⁶⁴ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005) h.

⁶⁵ Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), h.106

adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلُ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁶⁶

Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual suatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

⁶⁶ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Darun Nasyr Al Misyriyah).

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*) dan rasa olong-menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

6. Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut Zuhayli⁶⁷, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, dimana bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersam-sama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

⁶⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 148

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul mal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa⁶⁸, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 143

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

Selain itu dalam buku Rachmat Syafe'I⁶⁹, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, laangan mengusahaka, da pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta odal telah diserahkan ketika pembatala dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b. Salah seorang akid meninggal dunia.

Jumhur ulama' berpendaat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik maupu pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang aka natal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

- c. Salah seorang akid gila.

Jumur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

⁶⁹ Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*, h. 237

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

B. Sistem Bagi Hasil Usaha Cuci Mobil

1. Dasar Hukum

Bagi hasil Cuci Mobil dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil cucian mobil diperbolehkan.

Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan *Mudharabah* dengan firman Allah surah al-baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.(Q.S Al-Baqarah 2:198)

Dasar hukum kebolehan *Mudharabah* adalah ijma' dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarnya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena musaqah dan mudharabah keduanya diperbolehkan.

2. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola

a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal

Pada kerja sama bagi hasil cucian mobil pemilik Cucian mobil selaku pemberi modal mempunyai kewajiban terhadap karyawannya yaitu:

- 1) Menyediakan seluruh perlengkapan dan dipergunakan dalam menjalankan usaha cucian mobil.
- 2) Wajib membayar dan memberikan upah kerja dan bagi hasil kepada karyawan menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama.

- 3) Wajib mengawasi dan mengontrol dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan sehubungan dengan pelaksanaan usaha cucian mobil.
- 4) Wajib memberikan jaminan kerja dan jaminan kerjasama.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka pemilik usaha juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- 1) Menerima laba dan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.
- 2) Mencabut kembali uang yang telah diterima oleh karyawan apabila karyawan melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama sebelum masa akhir kerja, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- 3) Setiap waktu yang diperlukan pemilik usaha berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang telah dibuat dan dirincikan oleh karyawan.⁷⁰

b. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja

Pekerja memiliki beberapa kewajiban dalam akad kerja sama bagi hasil cucian mobil, yaitu:

- 1) Wajib menjaga dan merawat semua barang-barang cucian mobil.
- 2) Wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam pada pemilik modal apabila melakukan pinjaman.
- 3) Wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik cucian mobil.

⁷⁰ *Surat Perjanjian Kerja Sama Cuci Mobil*, (Online), Tersedia di <https://surat25.blogspot.com/2018/01/contoh-surat-perjanjian-kerjasama-cuci.html>

- 4) Wajib melaporkan sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan dalam waktu yang secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan dari perjanjian kerja.

Kewajiban-kewajiban tersebut timbul karena adanya perjanjian sedangkan hak pekerja yaitu:

- 1) Berhak menerima bagi hasil upah atau upah sebesar jumlah yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- 2) Berhak menerima bimbingan dan petunjuk dari pemilik usaha sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya.
- 3) Berhak menerima jaminan kerja dan kesehatan.
- 4) Berhak menerima kwitansi yang merupakan bukti atas sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik cucian mobil.⁷¹

Semua peraturan dalam perjanjian kerja yang berlaku di cucian mobil harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan pengelola sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sebuah usaha yang telah disepakati bersama yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha cucian mobil dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi dua belah pihak sedang semua peralatan cucian mobil dan biaya operasional ditanggung oleh pemilk cucian mobil.

⁷¹ *Ibid*

3. Tanggung Jawab Terhadap Resiko Kerugian Bagi Hasil Cucian Mobil

Secara garis besar antara pemilik cucian mobil dengan pengelola cucian mobil Kusuma Utama adalah 50:50, semua dana yang masuk dari usaha cucian mobil terhitung dari akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% bagi pengelola sedangkan semua peralatan dan biaya oprasional ditanggung dari modal utama atau modal awal dan apabila ada perlengkapan lainnya yang dibutuhkan maka diambil dengan modal lain-lain.

Secara rinci pengertian kata bagi hasil menuju kepada perolehan atau pendapat.⁷² *Share profit* dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) dan bagi hasil untung (*profit sharing*), tetapi dalam tekhnik perhitungan dikenal dengan dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung profit sharing adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pegelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha cucian mobil kusuma utama.

Adapun dana yang masuk dalam usaha cucian mobi kusuma utama berasal dari jasa dan tarif usaha cucian mobil di antaranya yaitu, :

- a. Tarif cucian mobil Rp. 30.000, perkendaraan
- b. Tarif cucian motor Rp. 10.000, perkendaraan

⁷² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.. h 300

Sedangkan kendaraan yang dikeluarkan untuk oprasional usaha cucian mobil kusuma utama dalam sebulan yaitu dirinci sebagai berikut:

- a. Biaya listrik Rp. 550.000,00 per bulan
- b. Biaya gaji karyawan Rp. 2.500.000,00 perbulan.

Dan biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik cucian mobil Kusuma Utama dalam melengkapi perlengkapan yang kurang adalah biaya dari hasil per-bulan di ambil dan disisihkan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan sistem bagi hasil (*share Profit*) diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan.

Share profit dapat mengandung pengertian bagi perolehan bagi untung rugi dalam teknik perhitungan dikenal perhitungan, dengan demikian juga pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam karena itu sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pemilik dan pengelola cucian mobil.

4. Pembagian Hasil Usaha

Anggaran biaya bulan pertama

Biaya gaji karyawan	Rp. 2.500.000,00
Biaya listrik, air dan telepon	Rp. 550.000,00
Biaya penyusutan peralatan usaha	Rp. 900.000,00
Biaya asuransi	Rp. 500.000,00
Biaya adm, umum dan pemasaran	Rp. 350.000,00
<u>Biaya tak terduga lainnya</u>	<u>Rp. 200.000,00</u>

Total biaya **Rp. 5.000.000,00**

Laba sebelum pajak **Rp.9.000.000,00 - Rp.5.000.000,00 = Rp. 4.000.000,00**

Pajak penghasilan 5% Rp. 200.000

Laba bersih **Rp. 3.800.000,00.**⁷³

Sebagai rincian perhitungan yang telah diuraikan di atas, hasil tersebut merupakan salah satu contoh pembukuan selama pembukaan usaha cucian mobil kusuma utama di laksanakan, dihitung dengan sesederhana mungkin dalam perhitungan perbulan yang dilaksanakan oleh usaha cucian mobil kusuma utama, namun dalam perhitungan bagi hasil tetap dalam musyawarah empat mata dengan pemilik dan pemodal tanpa mendatangkan pekerja.

⁷³ Sumber :*Observasi data Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu.*

Muḍarabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa awal Islam sebagai *instrument* utama yang mendukung para kafilah untuk menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama.

BAB III

PROFIL CUCIAN MOBIL

A. Gambaran Umum Cucian Mobil Kusuma Utama

1. Sejarah Cucian Mobil Kusuma Utama

Perusahaan pencucian mobil dan motor kusuma utama adalah salah satu cucian yang ada di desa Bandung Baru. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007. Awalnya mempunyai lahan yang cukup untuk menampung sekitar 2 mobil dan 2 motor, sekarang lahan diperluas dan dapat menampung 4 mobil dan 4 motor. Usaha ini dirintis oleh bapak Endang Muhammad dengan modal awal 100.000.000 dan menghasilkan sekitar Rp. 9.000.000/bulan.¹

Tenaga kerja cucian mobil kusuma utama berjumlah 4 orang dengan system bagi hasil berdasarkan persen, untuk cucian sebuah mobil dengan harga Rp. 30.000,- sedangkan cucian motor Rp. 10.000,-.

Kusuma utama adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa pencucian kendaraan mobil atau motor, usaha ini milik Pak Endang, seorang pensiunan pekerja jasa tirta. Usaha ini sudah berdiri sejak 2007. Tempat usaha ini memiliki luas 50 m² (10 m x 5 m). letak lokasi ini berada di jalan Desa Bandung Baru, dengan batas

Sebelah kanan: Tanah Kosong.

Sebelah kiri: Rumah Pak Margi.

¹ Ending Muhammad, Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2018

Alokasi waktu kerja di tempat usaha ini mulai pukul 07.00-17.00 dan hari kerja adalah tiap hari, usaha ini memperkerjakan empat pekerja, tanah atau tempat usaha yang digunakan oleh kusuma utama milik lahan pribadi,

Jasa yang ditawarkan oleh cucian mobil kusuma adalah jasa pencucian mobil dan motor, menurut Nara yang kami wawancari, untuk mendirikan usaha cucian mobil kusuma utama ini digunakan modal sebesar 100.000.000,00 dana ini digunakan untuk mengebor sumur, membeli pompa air, mesin diesel, dan peralatan cuci seperti sampo mobil dan motor, sikat dan kanebo dan pengkilat mobil. Modal ini termasuk juga untuk membangun tempat usaha dan pembuatan palang dan lain sebagainya.

Ada dua keterampilan yang harus di pahami oleh pengelola cucian mobil kusuma utama adalah:

- a. Standar kebersihan mobil dan motor dan cara membersihkan
- b. Mesin kendaraan mobil dan motor (jangan sampai karena ketidaktahuan, mesin malah rusak karena terkena air).²

Dalam sistem pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.

² *Ibid.*,

Dalam bidang pemasaran, target yang diharapkan oleh usaha ini adalah pemilik kendaraan mobil dan motor dengan hanya mengandalkan sepanduk atau papan nama yang di pasang di tempat usaha yang digunakan sudah tidak lagi sesuai dengan jaman sekarang karena sudah canggihnya teknologi.

2. Letak Geografi Cucian Mobil Kusuam Utama

Desa Bandung Baru memiliki luas wilayah 596.600 Ha dengan lahan produktif 380.6 Ha meliputi:

Tabel I

Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS	KET.
1	Pemukiman	216.006 Ha	
2	Sawah irigasi teknis	- Ha	
3	Sawah irigasi setengah teknis	108.297 Ha	
4	Sawah tadah hujan	67.927 Ha	
5	Perkebunan	115.855 Ha	
6	Tegalan	90.570 Ha	
7	Pasar	1 Ha	
8	Kuburan	3.5Ha	
9	Jalan, sungai dll.	590 Ha	

Tabel II
Jumlah RW dan RT

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	KET.
1	Bandung Baru Barat	1	2	
2	Bandung Baru Timur	1	2	
	J U M L A H	2	4	

Letak Desa Bandung Baru berada disebelah barat Ibu Kota Kecamatan Adiluwih jarak dari Desa Bandung Baru ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 8 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 14 km.

a. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Bandung Baru sebanyak 1668 jiwa dengan penduduk usia produktif 1618 jiwa, sedangkan penduduk yang di kategorikan miskin 50 Kepala Keluarga. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah b e r k e b u n / petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah Hasil pertanian sawah dan kopi.

Tabel III
Jumlah Penduduk Tiap Dusun.

No	NamaDusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
				Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bandung Baru I	2	208	470	380	850
2	Bandung Baru II	2	252	339	479	818
Jumlah		4	460	809	859	1668

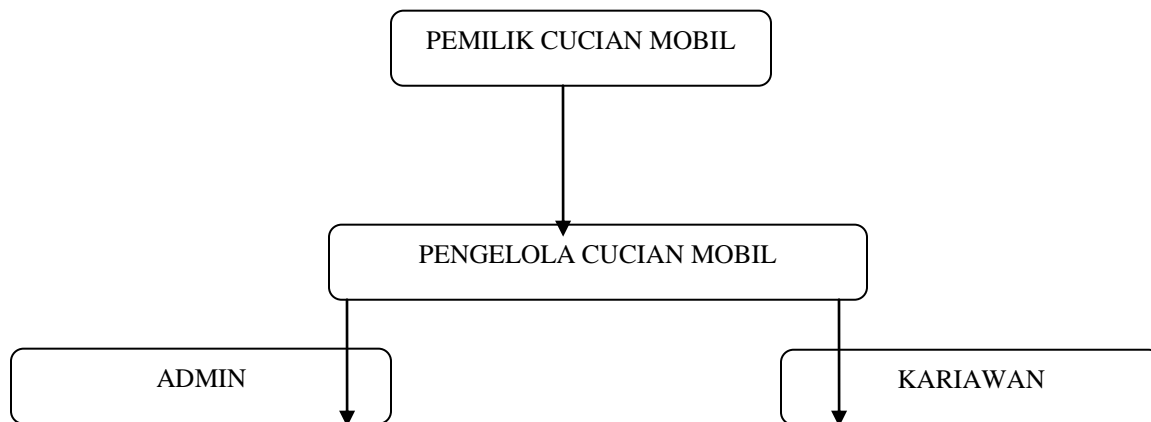
Tabel IV
Mata Pencaharian Penduduk Desa Bandung Baru

No	MataPencaharian	Jumlah
1	PNS	39 Orang
2	TNI dan POLRI	2 Orang
3	Petani	1139 Orang
4	Buruh	152 Orang
5	Pedagang	85 Orang
6	Pertukangan	50 Orang
7	Karyawan swasta	33 orang
8	Mengurus Rumah Tangga	42 Orang
9	Belum bekerja	15Orang
10	Tidak bekerja	32 Orang
11	Lain-lain	59 Orang

Sumber Data dokumentasi, 23 Mei 2018

3. Struktur Organisasi Cucian Mobil Kusuma Utama

Adapun struktur organisasi cucian mobil kusuma utama adalah



Sumber Data dokumentasi, 23 Mei 2018

Adapun pejelasananya adalah;

- a. Pemilik cucian mobil kusuma utama adalah untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha cucian mobil
- b. Pengelola cucian mobil kusuma utama adalah untuk mengontrol karyawan saat bekerja
- c. Admin adalah bertugas untuk membukukan kegiatan usaha selama sebulan dan seterusnya
- d. Karyawan adalah bertugas bekerja mencuci mobil dan motor konsumen.³

³ *Ibid.*,

B. Praktek Kerjasama Bagi Hasil Pihak Cucian Mobil Kusuma Utama Dengan Pengelola Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik cucian mobil membagi hasil dengan pengelola dengan cara 50:50 bagi hasil persetiap bulan adapun tahapan-tahapan dalam proses transaksi kerjasama bagi hasil pemilik dan pengelola usaha cucian mobil kusuma utama adalah

1. Antara pemilik modal dan pengelola

Dalam transaksi bagi hasil ini, pengelola dengan sendirinya datang kepada pemodal untuk meminta izin guna menjadi mitra kerjasama dalam bidang usaha cucian mobil, sebab di Desa Bandung Baru jumlah cucian mobil belum ada sedang pemilik kendaraan banyak, sehigga peluang untuk membuka cucian mobil sangatlah besar untungnya. Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola biasanya terjalin dengan sendirinya karena adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi pemodal yang tidak banyak waktu untuk mencuci mobil pelanggan dapat terbantu dengan adanya pengelola sebagai mitra, begitu juga pengelola dengan adanya pemodal maka ia dapat bekerja.

2. Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara kedua belah pihak, yang didalamnya membicarakan tentang waktu kerjasama sampai besarnya bagian kedua belah pihak, akan tatapi pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam usaha cucian mobil kusuma utama ini relative sebab tergantung dari keinginan si pengelola itu sendiri, atau begitu juga sebaliknya

bila si pengelola tidak mau mengikuti suatu ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pemodal dapat menghentikan pengelola sebagai mitra, begitu juga mengenai pembagian hasil, pemodal menetapkan hasil sebagai keuntungan.

Berikut hasil wawancara, seperti yang disampaikan oleh bapak Endang Muhamad yang penulis temui saat wawancara, beliau adalah pemilik modal sekaligus pemilik cucian mobil kusuma utama, penjelasan beliau mengenai sistem bagi hasil di usahanya adalah semua pendapatan selama satu bulan di ambil biaya oprasional langsung dibagi dengan pihak pengelola dengan bagian 50:50. Dan jika ada kerugian di komulatifkan di bulan berikutnya.⁴

Mengenai perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya kedua belah pihak saling percaya saja. Sistem pemodalan dalam usaha cucian mobil kusuma utama seluruh modal berasal dari pemodal atau pemilik dan uang yang dijadikan sebagai modal diperoleh dari uang pribadi bisa juga dari pinjaman Bank. Dan termasuk dalam biaya oprasional yaitu alat-alat perlengkapan cucian mobil, minyak solar atau bensin, atau arus listrik untuk semua perlengkapan cucian mobil kusuma utama dapat beroperasi.

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga

⁴ *Ibid.*,

dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Menurut pemodal agar pemberian fasilitas yang pengelola punya atau yang di butuhkan si pengelola, begitu juga dengan modal yang disediakan dari pemodal yakni termasuk juga untuk biaya hidup untuk pengelola dan pekerja, namun tetap saja terhitung dalam biaya oprasional.⁵

Pemodal tetap melakukan pengawasan kepada pengelola dalam pelaksanaan usaha cucian mobil kusuma utama, berikut rincian contoh penghitungan dalam menentukan bagi hasil usaha cucian mobil dalam satu bulan finish yang tersusun dapat dari arsip pemodal saat wawancara menggunakan rumus (Pendapatan-Biaya oprasional = SHU/ Sisa Hasil

⁵ Ibid.,

Usaha). Setelah menyusun arsip Pendapatan tersebut, kemudian saya menanyakan rincian biaya

Data Gambaran Keuangan Awal

Modal awal	Rp. 100.000.000,00
Peralatan cuci dan pemasangan	Rp. 60.000.000,00
Perlengkapan cuci	Rp. 5.000.000,00
Asuransi untuk 1 tahun	Rp. 6.000.000,00
Biaya perijinan	Rp. 1.625.000,00
Meja dan kursi tunggu	Rp. 6.000.000,00
Seragam operator cuci	Rp. 1.500.000,00
Etalase sedang 2 unit	Rp. 1.500.000,00
Total anggaran	<u>Rp. 81.625.000,00</u>
Kas ditangan	Rp. 18.375.000,00

Upah bulanan kepada karyawan yakni:

1. Bagian Administrasi, Umum dan Pemasaran :

Menyimpan dan mengurus data administrasi perusahaan serta legalitasnya.

Gaji Rp. 500.000

2. Operator Cuci 4 orang bertugas melaksanakan pencucian motor dan mobil.

Gaji @ Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000 perbulan.

Anggaran pendapatan bulan pertama

Pendapatan cuci motor 30 hari (15x Rp. 10.000,00) Rp. 4.500.000,00

Pendapatan cuci mobil 30 hari (5 x Rp. 30.000,00) Rp. 4.500.000,00

Total pendapatan perbulan **Rp. 9.000.000,00**

Anggaran biaya bulan pertama

Biaya gaji karyawan Rp. 2.500.000,00

Biaya listrik, air dan telepon Rp. 550.000,00

Biaya penyusutan peralatan usaha Rp. 900.000,00

Biaya asuransi Rp. 500.000,00

Biaya adm, umum dan pemasaran Rp. 350.000,00

Biaya tak terduga lainnya Rp. 200.000,00

Total biaya **Rp. 5.000.000,00**

Laba sebelum pajak **Rp.9.000.000,00- Rp. 5.000.000,00= Rp. 4.000.000,00**

Pajak penghasilan 5% Rp. 200.000

Laba bersih **Rp. 3.800.000,00.**⁶

Sebagai rincian perhitungan yang telah diuraikan di atas, arsip tersebut merupakan salah satu contoh pembukuan selama pembukaan usaha cucian

⁶ Sumber : *Observasi data Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluh Kabupaten Pringsewu.*

mobil kusuma utama di laksanakan, dihitung dengan sesederhana mungkin dalam perhitungan perbulan yang dilaksanakan oleh usaha cucian mobil kusuma utama, namun dalam perhitungan bagi hasil tetap dalam musyawarah empat mata dengan pemilik dan pemodal tanpa mendatangkan pekerja.

Muḍarabah tidak merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa awal Islam sebagai *instrument* utama yang mendukung para kafilah untuk menyediakan tenaga dan keahlian dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi oleh mereka sesuai yang mereka tetapkan bersama.

Akad yang diucapkan oleh pemodal dengan lisan ketika membuat suatu perjanjian kerjasama menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak sedangkan proses pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada pengelola tanpa campur tangan dari pemodal. Hanya saja pengelola mendapatkan pengawasan namun tidak mutlak, adapun kendala yang dialami bapak Endang dalam usaha cucian mobil kusuma utama adalah tentang cuaca atau musim yang ada di Indonesia, apa bila musim hujan sering pelanggan mencuci mobil atau motor dikarenakan sering kali kendaranya kotor, dan apa bila musim kemarau agak sepi cucian mobil dikarenakan tidak banyaknya masyarakat yang mencuci kendaraannya.⁷

⁷ *Op. Cit.*,

Semua peraturan dalam perjanjian kerjasama yang berlaku di Usaha cucian mobil kusuma utama harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara pemilik usaha dengan pengelola sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam sebuah usaha yang telah disepakati bersama, yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha cucian mobil dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% untuk pengelola sedangkan semua peralatan Cucian mobil dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik dan pengelola besama-sama.

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah saling amanah, haram jika keduanya saling berkhianat. *Syirkah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *sighat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerjasama. Selain itu hal yang dapat di ambil dari konsep *syirkah* adalah adanya sifat tolong menolong , bahu membahu demi satu tujuan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya sesama sehingga menimbulkan keberkahan.

Berdasarkan pemahaman di atas maka penulis mengambil kesimpulan dimana *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan perkongsian kerja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama-sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Keduanya juga memiliki kelebihan karena Islam telah mengatur kode etik

ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual untuk sistem perekonomiannya.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandng Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, mereka melakukan akad kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian mobil kusuma utama. Kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian mobil kusuma utama merupakan salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian mobil kusuma utama merupakan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak baik pemilik cucian mobil maupun pengelola cucian mobil kusuma utama dan kerjasama bagi hasil ini layak untuk dijadikan usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pemilik dan pengelola cucian mobil kusuma utama menerapkan kerjasama bagi hasil dalam bidang usaha cucian mobil.

Kerjasama bagi hasil pengelolaan cucian mobil kusuma utama didasarkan pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama pemilik cucian mobil kusuma utama dan pengelola cucian mobil kusuma utama mampu menguntungkan kedua belah pihak yang kerjasama.

Dengan latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan dan menguntungkan yaitu pengelola cucian mobil kusuma utama membutuhkan tempat untuk bekerja dan dana untuk modal bekerja, sedangkan pemilik cucian mobil membutuhkan tenaga dan kemampuan dalam mengelola tempat usaha cucian mobil miliknya. Untuk memenuhi harapan tersebut, maka bekejasama merupakan alternative yang baik dalam kegiatan pengelolaan tempat usaha cucian mobil kusuma utama.

Prinsip utama kerjasama adalah saling memerlukan dan membutuhkan dan saling menguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak dapat merupakan modal atau barang, tenaga dan kemampuan. Inti dari kerjasama ini adalah usaha cucian mobil kusuma utama, sehingga kebutuhan hidup antar keduanya dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil antara pemilik cucian mobil kusuma utama dengan pengelola cucian mobil dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari kali ini disebabkan karena hasil yang diperoleh dari usaha cucian mobil memiliki nilai pendapatan sistem bagi hasil ini merupakan peluang bisnis atau alternative yang dapat diusahakan untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kerjasama bagi hasil pengelolaan usaha cucian mobil, seorang pengelola harus memiliki keahlian yang benar-benar di kuasai, yang tentunya mempunyai pengetahuan tentang usaha cucian mobil yang lebih untuk mendapatkan hasil yang

maksimal. tapi ini yang menjadi titik lemah pengelola kurangnya pengetahuan karena kurangnya pendidikan, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan. Padahal pendidikan adalah hal utama bagi kesuksesan seseorang, tapi tidak lepas dari usaha dan do'a. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendidikan bagi setiap masyarakat yang melaksanakan kerjasama bagi hasil usaha cucian mobil ini.

Ada beberapa kendala yang mengakibatkan pengelola harus banyak mengeluarkan uang untuk memperbaiki mesin pompa apabila mesin rusak perlengkapan pencucian apabila sudah habis, menurut penuturan pengelola cucian mobil kusuma utama, besarnya kebutuhan ekonomi keluarga yang harus mereka tanggung selaku kepala keluarga yaitu tanggungan hutang yang cukup besar kepada pihak Bank dan Asuransi untuk keperluan kredit kendaraan roda dua, biaya anak sekolah, dan terkadang sepiunya konsumen atau orang yang mencuci kendaraananya dan mengakibatkan pendapatan tidak stabil.¹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukanNya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga

¹ Bpk Endang Muhamad, Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama , *Wawancara*, 23 April, 2018

dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduksi uang, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut.

Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan *Mudharabah* dengan firman Allah surah al-baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S Al-Baqarah 2:198)

Dasar hukum kebolehan *Mudharabah* adalah *ijma'* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya dan karena *musaqah* dan *mudharabah* keduanya diperbolehkan.

Aktivitas berusaha dan bekerja dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim Secara umum sistem bagi hasil antara pemilik cucian mobil dengan pengelola yaitu 50:50. Semua dana yang masuk dari usaha cucian mobil dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 50% untuk pengelola sedangkan semua peralatan cucian mobil dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik usaha dan pengelola hanya bekerja saja.

Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk kepada perolehan dan pendapatan.² *Share profit* dapat mengandung pengertian bagi perolehan *revenue sharing* bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*), tetapi dalam teknik perhitungan, dikenal dengan dua istilah bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi untung *profit sharing* adalah pembagian keuntungan usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan pola ini juga digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaganya pada penabung (*depositor*).³

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 300.

³ M.Ridhwan, *Pemahaman Nasabah Terhadap Konsep Pembiayaan Mudharabah Dan Kesepakatan Nisbah Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*, (Thesis), (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007), h. 88.

Dalam hadis Rasulullah saw. menyatakan bahwa:

مَا كُنَّا نَرَى فِي الْمَزَارَةِ بِأَسَا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ، فَزَكَرْتُ لَطَاوُسَ فَقَالَ : قَالَ لِي أَعْلَمُهُمْ (يَقْصِدُ ابْنَ عَبَّاسٍ) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ : لِأَنْ يُمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَاقِبَتَهَا خَرَّاجًا مَعْلُومًا - رواه الخمسة⁴

Artinya :

“Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara’ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah saw melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata, ”orang yang paling mengerti dalam hal ini telah memberitahukanku (maksudnya Ibnu Abbas, r.a)” sesungguhnya Rasulullah saw. tidak melarang muzara’ah (bagi hasil), beliau hanya berkata, ”memberikan tanah kepada seseorang itu lebih baik dari pada meminta pajak tertentu,” (Hadist riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pekerja dilakukan secara adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab, tanpa adanya unsur kecurangan, *gharar*, ketidakadilan dan unsur penipuan antara keduanya, karena biasanya sistem bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Share profit adalah bagi hasil yang dihitung dari seluruh total pendapatan pengelolaan dana. Demikian juga pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan Islam karena itu sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan dalam ekonomi diatas namakan

⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha’bi,t.t.), h. 112.

Islam yang menekankan pada pembagian hasil usaha yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam perkembangannya lembaga keuangan *syariah* biasanya memberlakukan pola sistem bagi hasil itu untuk pembiayaan perdagangan. Dalam hukum islam (*fiqh*), bagi hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah* (*Mudharabah muqayyadah*). Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk bunga.⁵

Selain itu perhitungan laba atau rugi dalam praktik *Mudharabah muqayyadah* dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pihak pengelola yang diterima oleh pemilik usaha bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah muqayyadah*, sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *Mudharabah muqayyadah*. Kerugian pembiayaan *Mudharabah* yang di akibatkan penghentian *Mudharabah muqayyadah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *Mudharabah muqayyadah*. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak *Mudharabah muqayyadah* akan dibebankan pada pihak pengelola. Bagian laba yang tidak dibayarkan oleh pihak pengelola pada saat *Mudharabah muqayyadah* selesai

⁵ Waqaar msood khan, *toward, An interest-free Islamic Economic System*,(UK: The Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics, Islamabad, 1985M-1406 H), hlm. 28.

atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pihak *muḍarib*.

Implementasi konsep bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga pihak pemilik usaha juga harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktifitas *Mudharabah muqayyadah*. *Nisbah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Penentuan *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan pada porsi setoran modal.⁶ Keuntungan bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *Mudharabah muqayyadah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *return* and *timing cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula apabila laba bisnisnya kecil mereka mendapat bagian kecil juga. Filosofi ini hanya berjalan jika *nisbah* laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

⁶ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), hlm. 184.

Perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara bagiannya. Namun sistem bagi hasil yang berlandaskan syariah seperti *Mudharabah muqayyadah* tidak sepenuhnya mengalami kerugian, justru terkadang mengalami keuntungan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep *Mudharabah muqayyadah* di atas penulis menilai bahwa Cucian Mobil Kusuma utama belum sepenuhnya melaksanakan sistem *Mudharabah muqayyadah* dikarenakan Cucian Mobil Kusuma Utama ini pada saat mengalami kerugian pemilik meminta kepada seluruh pengelola untuk bertanggung jawab (ganti rugi) terhadap barang yang rusak. Para pemilik mengutip/mematok uang ganti rugi sesuai nominal harga barang.⁷

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha *cucian mobil kusuma utama* ini belum sepenuhnya menggunakan konsep *Mudharabah muqayyadah*, karena pihak pemilik modal dengan pengelola melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep *Mudharabah muqayyadah*, dimana pemilik bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola.

⁷ Bpk Endang Muhamad, Pemilik Cucian Mobil Kusuma Utama , *Wawancara*, 23 April, 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh Cucian Mobil Kusuma Utama menurut penulis sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya Pengelola memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih pemilik maupun pengelola tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset konsumen pencuci mobil perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada Cucian Mobil Kusuma Utama ini dikalikan dengan jumlah pencuci mobil yang diterima perharinya dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi suatu penipuan.
2. Tinjauan konsep *mudharabah muqayyadah* terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pekerja pada hal dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Namun hal penggajiannya pemilik usaha Cucian Mobil Kusuma Utama telah

menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu pihak pertama selaku pemilik.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya Hukum Islam. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemodal yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengeola diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong-menolong seperti surat firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 2.
2. Keuntungan dilakukan dengan persentasi yang jelas dan adil seperti 50:50, dan apabila ada kerugian atau resiko dapat ditanggung bersama.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujiep, M., dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Abdullah, Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Darun Nasyr Al Misyriyah*
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah.
- Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, 2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006
- Al-Mushlih, Abdullah Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta:
Daruq Haq, 2008
- Al-Syarbini, Muhammad, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, Indonesia: Dar Al-
Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*,
Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie
Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Bukhari, Imam *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Sha'bi,t.t.,

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, Ali, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiq Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Juz II, Mesir: Tiariyah Qubra

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002

Khalaf Wahab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994

Margono S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*,
Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002

Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001

Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas
Ekonomi UII, 2004

Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah Dalam
Wacana Fiqh dan Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam
PSEI,

Musleihudin, Muhammad, *Sistem Perbankan Salam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1994

Narbuko Cholid dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
cet.8, 2007

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007

Nawawi, Ismail *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia,
2012

Qadamah, Ibnu *Al-Mughni*, Jilid V, Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah,tt

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil BMT*, Yogyakarta: UII
Press, 2004

Rifa'I, Moh, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra,
1978

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, Bandung: AL Ma'arif, 1997
- Safe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Siddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Silvanita Mangani, Ketut, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011
- Subagyo Jogo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003
- Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, Bandung: Alma'arif
- Umer Capra, M, *Towards A Just Monetary System terjemahan*, London: The Islamic Foudation, 1985
- Waqaar msood khan, *toward, An interest-free Islamic Economic System*, UK: The Islamic Foundation UK and International Association For Islamic Economics, Islamabad, 1985M-1406 H,
- Yahya Zakaria, Abu Riyadus Salihin, *Terjemah Al-Hafidz dan Masraf Suhaini*, Surabaya: CV. Mahkota, 1994
- Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah bin, *Sunan Ibnu Majah*, Darun Nasyr Al Misyriyah.